

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, N. H. 2022. Analisis Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Yang Terhutang Pada PT Bakti Mandiri Perkasa. *Journal of Sustainability Bussiness Research (JSBR)*, 3(4), 203-215. <https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/jsbr/article/view/6515/4379>. Diakses pada tanggal 4 Juli 2023
- Agung, A. A. P., dan Yuesti, A. 2019. Buku Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif dan Kualitatif. Bali: CV. Noah Aletheia.
- Damayanti, D., Ridwansyah, E., dan Nurmala, N. 2020. Mengkaji Dampak Penerapan Strategi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) terhadap PPh Terutang WPOP. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 14(1), 75-86. <https://jurnal.polinela.ac.id/ESAI/article/view/2386>. Diakses pada tanggal 2 Juli 2024.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2019. Laporan Tahunan 2018. <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-11/Laporan%20Tahunan%20DJP%202018%20-%20bahasa%20Indonesia.pdf>. Diakses pada tanggal 4 Juli 2023.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2020. Laporan Tahunan 2019. <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2020-12/Laporan%20Tahunan%20DJP%202019%20-%20INDONESIA.pdf>. Diakses pada tanggal 4 Juli 2023.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2021. Laporan Tahunan 2020. <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2021-10/Laporan%20Tahunan%20DJP%202020%20-%20Bahasa.pdf>. Diakses pada tanggal 4 Juli 2023.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2022. Laporan Tahunan 2021. <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2022-11/Laporan%20Tahunan%20DJP%202021%20-%20Bahasa.pdf>. Diakses pada tanggal 4 Juli 2023.
- Eko, S. 2015. Menyusun proposal penelitian kualitatif skripsi dan tesis. Yogyakarta: Suaka Media.
- Indriantoro, N., Supomo, B. 2018. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: Andi.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 557/KMK.04/2002. 2002. *Tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor*.

Kusumastuti, H., dan Putri, E. N. 2019. Mekanisme Pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai Atas Faktur Pajak Masukan Manual. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan (JABT)*, 1(2), 1. <https://scholarhub.ui.ac.id/jabt/vol1/iss2/1/>. Diakses pada tanggal 4 Juli 2023.

Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Andi.

Mazidah, A. 2023. Apa Itu Ekualisasi Pajak? <https://ortax.org/apa-itu-ekualisasi-pajak>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2023.

Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-27/BC/2016. 2016. *Tentang Tata Laksana Pemasukan Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Tempat Penimbunan Berikat Dan Pengeluaran Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dari Tempat Penimbunan Berikat Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean*.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2022. 2022. *Tentang Faktur Pajak*.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012. 2012. *Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/PMK.03/2010. 2010. *Tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015. 2015. *Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.04/2011. 2011. *Tentang Kawasan Berikat*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014. 2014. *Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008. 2008. *Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000. 2000. *Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009. 2009. *Tentang Tempat Penimbunan Berikat*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010. 2010. *Tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan*.

Resmi, S. 2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Sandi, F. B. 2020. SP2DK: Surat Edaran Bagi yang Belum Memenuhi Kewajiban Perpajakan. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/sp2dk>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2023.

Saputri, V. M. E. 2022. Ekualisasi SPT Masa PPN terhadap SPT Tahunan Badan dalam Mengantisipasi Pemeriksaan Pajak pada PT X. *VOK@ SINDO: Jurnal Ilmu-Ilmu Terapan dan Hasil Karya Nyata*, 9(2), 63-74. <https://vokasindo.ub.ac.id/index.php/vokasindo/article/view/169/pdf>. Diakses pada tanggal 4 Juli 2023.

Sayekti, L. K., dan Sarjono, B. 2022. Ekualisasi SPT Masa PPN Dan SPT Masa PPh Dengan SPT Tahunan PPh Terhadap Kewajiban Perpajakan CV. Abadi. *Jurnal Bisnis Terapan*, 6(02), 183-196. <http://repository.ubaya.ac.id/43267/1/5220-Article%20Text-15356-2-10-20230120.pdf>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2023.

Siahaan, W. H. 2022. Apa itu Ekualisasi Pajak? <https://enforcea.com/insight/apa-itu-ekualisasi-pajak>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2024.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sukmawati, A., dan Winata, A. 2019. Ekualisasi SPT Masa Dengan SPT Tahunan Badan Untuk Mengantisipasi Potensi Pemeriksaan Pajak Pada PT A Di Kota Solo. *Jurnal VOK@ SINDO*, 7(2), 88-99. <https://vokasindo.ub.ac.id/index.php/vokasindo/article/view/111/pdf>. Diakses pada tanggal 19 Juni 2023.

Sukrisno, A., dan Estralita, T. 2013. *Akuntansi Perpajakan*, Edisi ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015. 2015. *Tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Kunjungan Kepada Wajib Pajak*.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. 2009. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. 2007. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. 2008. *Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.*

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. 2009. *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.*

Walidin, W., Saifullah, dan Tabrani. 2015. Metodologi penelitian kualitatif dan *grounded theory*. FTK Ar-Raniry Press.